

BAB I

PENDAHULUAN

1.2 Latar Belakang

Pemerintah memiliki peran yang penting dalam menyediakan pelayanan kepada seluruh warga negaranya, salah satu hal penting yang dirasakan oleh masyarakat ialah pelayanan publik yang diberikan dan disediakan oleh pemerintah. Karena kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat, masyarakat sering menuntut pelayanan yang berkualitas sehingga pelayanan publik menjadi isu sentral dan strategis.¹ Pelayanan publik dapat didefinisikan sebagai segala bentuk pelayanan publik yang diberikan oleh pejabat publik berupa penyediaan barang atau jasa sesuai dengan kebutuhan masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²

Pelayanan di sektor publik adalah proses serta *output* yang menunjukkan bagaimana fungsi pemerintah dijalankan sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Pasal 1 tentang Pelayanan Publik yang menyatakan bahwa pelayanan adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara

¹Citra Ayu Foni Andiyana dan Meirinawati, Inovasi Layanan Administrasi 30 Detik untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan di Kantor Desa Pangkahkulon Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Publika, Vol 4 No 11, 2016, hlm. 2.

²Endang Larasati, Pelayanan Publik dan Demokrasi dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. Dialogue Jurnal Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik Universitas Diponegoro, Vol. 5 No. 1, 2008, hlm. 99.

dan penduduk atas barang, jasa serta pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.³

Pelayanan publik sendiri merupakan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah maupun swasta yang dapat berupa barang ataupun jasa. Pelayanan publik adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah atas nama sejumlah besar orang, yang kesemuanya mempunyai kegiatan yang menguntungkan atau memberikan kepuasan kepada suatu kelompok atau badan, tetapi hasilnya tidak terikat secara fisik dengan produk.⁴

Tujuan utama penyelenggaraan pelayanan publik adalah membantu menyelesaikan berbagai masalah dan kepentingan masyarakat serta memenuhi kebutuhan masyarakat. Menyediakan pelayanan publik yang berkualitas bagi masyarakat memang tidaklah mudah, pemerintah perlu membuat pelayanan yang sesuai.⁵ Agar masyarakat merasakan kenyamanan dari pelayanan yang disuguhkan pemerintah, maka pemerintah perlu terus berupaya memberikan pelayanan yang mudah untuk diakses oleh masyarakat dan melakukan inovasi setiap tahunnya dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan.⁶

³Jurles J. Latuheru,... *Smart Governance* di Halmahera Utara sebagai Upaya Inovasi Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. *Jurnal Politico Universitas Sam Ratulangi*, Vol 10 No.3, 2021, hlm. 2.

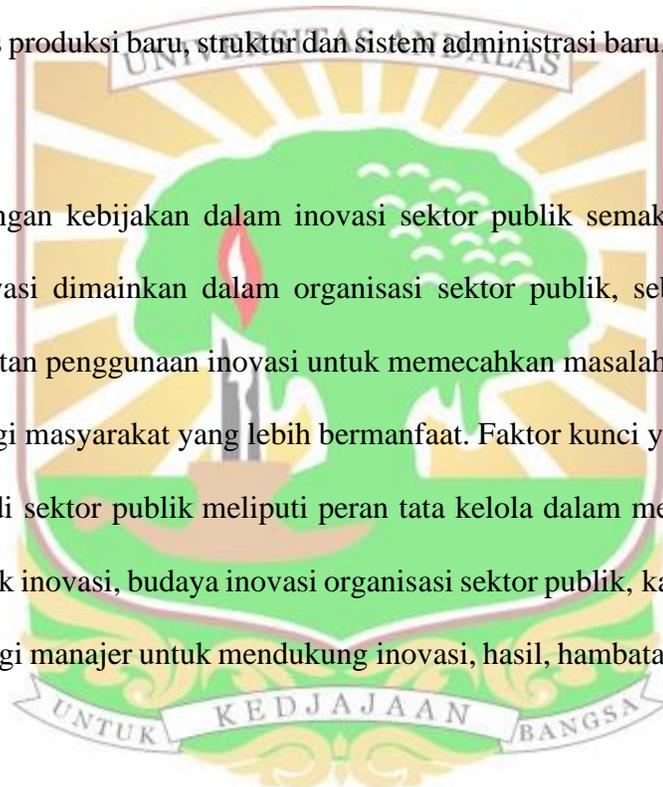
⁴ Harbani Pasolong, *Teori Administrasi Publik*, Alfabeta, Bandung, 2007, hlm. 129.

⁵Zulfa Auliana Haqie, Rifda Eka Nadiah dan Oktavira Puteri Ariyani, Inovasi Pelayanan Publik Suroboyo Bis Di Kota Surabaya, *JPSI (Journal of Publik Sector Innovations)*, Vol. 5, No. 1, 2020, Hlm. 24.

⁶Fitri Dwi Laraswati dan Fitrotun Niswah, Inovasi Layanan Sepasar Pedas (Sekolah Pasar Rakyat Pedagang Cerdas) Dalam Meningkatkan Eksistensi Pasar Tradisional di Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang, *Jurnal Publika*, Vol. 9, No. 2, 2021, Hlm. 2.

Untuk menciptakan pelayanan yang nyaman bagi masyarakat dan sesuai dengan perkembangan jaman pada saat ini maka pelayanan memerlukan adanya inovasi. Inovasi merupakan konsep yang berkembang dari waktu ke waktu yang menyesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Inovasi organisasi adalah penerapan ide atau perilaku baru dalam organisasi seperti produk dan layanan baru, teknologi proses produksi baru, struktur dan sistem administrasi baru, atau rencana atau program baru.⁷

Kepentingan kebijakan dalam inovasi sektor publik semakin terkait dengan bagaimana inovasi dimainkan dalam organisasi sektor publik, sebagai bagian dari tujuan peningkatan penggunaan inovasi untuk memecahkan masalah dan menciptakan hasil inovasi bagi masyarakat yang lebih bermanfaat. Faktor kunci yang memengaruhi proses inovasi di sektor publik meliputi peran tata kelola dalam membentuk inovasi, sumber ide untuk inovasi, budaya inovasi organisasi sektor publik, kapabilitas, dan alat yang tersedia bagi manajer untuk mendukung inovasi, hasil, hambatan, pendorong, dan tujuan.⁸



Dalam penelitiannya yang berjudul *Advancing Innovation in the Public Sector: Aligning Innovation Measurement with Policy Goals*, Arundel dkk mengatakan bahwa;

“under all forms of governance, innovation in the public sector is often undertaken on an ad hoc basis, for instance in response to

⁷Yogi Suwarno dan M. Ikhsan, Reformasi Pelayanan Publik di Daerah, Jurnal Inovasi Pelayanan Publik, vol II, No.1, 2006.

⁸ Anthony Arundel, Carter Bloch, Barry Ferguson, *Advancing Innovation in the Public Sector: Aligning Innovation Measurement with Policy Goals*, Journal Elsevier, ResearchPolicy 48, hlm 794, 2019.

new policies, expectations of declining budgets, or demand for new or improved services.”

Berdasarkan kutipan di atas, Inovasi yang dilakukan oleh sektor publik pada dasarnya dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu seperti untuk menerapkan kebijakan baru, untuk mengurangi penggunaan anggaran, permintaan akan bentuk pelayanan yang lebih baru dan lebih baik. Dapat dikatakan inovasi-inovasi yang ada pada sektor publik merupakan salah satu cara yang dilakukan organisasi publik untuk mencapai tujuan kebijakan publik dalam memberikan pelayanan yang lebih baik, efektif, dan efisien kepada masyarakat. Hal ini didukung dengan diterbitkannya keputusan pemerintah melalui Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*, sehingga dengan hal tersebut banyak instansi publik yang mulai mengembangkan berbagai bentuk inovasi dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat dengan konsep digital memanfaatkan kemajuan teknologi yang lebih efektif dan efisien.⁹

Kemajuan teknologi informasi merupakan bagian dari globalisasi yang tidak terlepas dari masyarakat modern saat ini, yang sangat menuntut masyarakat untuk pemerintah sebagai penyedia layanan yang lebih terbuka, efektif dan efisien. Kemajuan teknologi ini dapat memudahkan pemerintah dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan juga mempermudah akses informasi. Saat ini pemerintah pusat hingga pemerintah

⁹Eprilianto, D. F. (2022). Inovasi Digital dalam Sektor Publik: Studi Deskriptif Tentang Value Added Inovasi Pelayanan Kesehatan. *Jurnal EL-RIYASAH*, 13(1), 33-49.

daerah menggunakan kemajuan teknologi informasi berbasis internet yang sedang menjadi trend dalam memberikan pelayanan publik yang terbaik untuk masyarakat.¹⁰

Adanya teknologi yang diterapkan dalam pemerintahan akhirnya memberikan kebebasan dan transparansi kepada masyarakat untuk melakukan tugas yang semakin kompleks, sehingga pemerintah mulai menerapkan *e-government*. *E-government* adalah sistem manajemen berbasis teknologi yang bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dan meningkatkan pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan publik secara cepat dan tepat waktu.¹¹ Implementasi pelayanan yang menggunakan kemajuan teknologi diharapkan dapat mengubah proses transaksi tradisional yang membutuhkan banyak waktu dan sumber-sumber, untuk menjadi lebih modern dan praktis. Hal ini menyebabkan pemerintah tidak hanya memaksimalkan keuntungan yang ditawarkan melalui pelayanan yang dimiliki, tapi juga harus mengurangi bahkan menghindari kerugian yang dihasilkan jika pemerintah tidak dapat beradaptasi dengan perubahan teknologi yang cepat.¹²

Implementasi *e-government* di Indonesia dimulai pada tahun 2003 dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden no. 3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*, sejak diperkenalkan *e-government* ini,

¹⁰Haura Atthahara, Inovasi Pelayanan Publik Berbasis *E-Government*: Studi Kasus Aplikasi Ogan Lopian Dinas Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Purwakarta, Jurnal Politikom Indonesiana, Vol. 3, No. 1 Juli, 2018, hlm. 67.

¹¹Susianto, D., Ridhawati, E., & Sucipto, S. (2022). Implementasi *E-Government* Berbasis Android Untuk Meningkatkan Pelayanan Publik. *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Sains Dan Teknologi*, 7(3), 179-186.

¹²Rasyid, A., & Alfina, I. (2017). *E-Service Quality Evaluation on E-Government Website: Case Study BPJS Kesehatan Indonesia*. *Journal of Physics: Conference Series*, 801(1)

seluruh otoritas yang ada telah menerapkan berbagai inovasi yang dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi yang semakin cepat dan luas serta penggunaan teknologi informasi ini di sektor publik dapat dilihat dalam berbagai bidang. Dalam sektor publik sendiri penggunaan teknologi informasi mengalami peningkatan dari tahun ke tahun baik berupa *website* maupun aplikasi *mobile*, juga kepada instansi pemerintahan yang berhasil menerapkan konsep *e-government* diberikan penghargaan. Penghargaan tersebut merupakan upaya pemerintah untuk memberikan pengakuan dan motivasi kepada setiap instansi pemerintah yang telah mengembangkan berbagai inovasi di bidang masing-masing. Salah satu jenis inovasi yang sedang dikembangkan oleh pemerintah daerah adalah *e-health*, Menurut *World health Organization* (WHO) menjelaskan bahwa;

“E-health is the use of information and communication technologies (ICT) in support of health and health-related field, including health-care service, health surveillance, health literature, and health education, knowledge and research.”

Berdasarkan hal di atas, *E-kesehatan* merupakan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (ICT) dalam mendukung kesehatan dan hal yang berkaitan dengan lingkup kesehatan, termasuk pelayanan kesehatan, pengawasan kesehatan, literasi kesehatan, dan edukasi kesehatan, pengetahuan dan penelitian. Fokus dari konsep *e-health* adalah pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan kesehatan yang pengembangannya masih terfokus pada pelayanan medis yang berorientasi pada pasien yang hanya tersedia di rumah sakit pusat dan swasta serta unit-unit tertentu

karena aksesnya mahal, dan konsep *e-health* yang diterapkan biasanya dalam bentuk website maupun penggunaan aplikasi mobile¹³

Ritterband dkk mengungkapkan bahwa perangkat *mobile* memiliki kemampuan dan jangkauan yang luas sehingga dapat digunakan di bidang kesehatan untuk mengembangkan dan memberikan program kesehatan yang interaktif dan komprehensif yang bertujuan untuk mencapai perilaku kesehatan pasien yang benar dan mengurangi gejala yang merugikan.¹⁴ Beberapa manfaat dari penggunaan perangkat *mobile* di bidang kesehatan (*m-Health*) yaitu berupa *monitoring* jarak jauh, pengumpulan data jarak jauh, edukasi, pelacakan kasus dan wabah, pelatihan dan komunikasi tenaga kesehatan, pendukung diagnosis dan *treatment*.¹⁵ *Smartphone* menyediakan akses yang besar pada masyarakat modern dalam hal sumber daya pendidikan dan pembelajaran, seperti di negara berkembang, *smartphone* dapat dengan mudah mengimbangi akses internet dan data yang dapat membantu infrastruktur mereka dalam pengembangan pendidikan maupun pembelajaran.¹⁶

Kesehatan merupakan hal yang paling penting dalam mendukung pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat yang sejalan dengan cita-cita

¹³Eprilianto, D.F, Sari, Y. K., dan Saputra, B. 2019. Menujudkan Integrasi Data Melalui Implementasi Inovasi Pelayanan Kesehatan Berbasis Teknologi Digital. *Journal of Public Sector Innovation (JPSI)*. Vol. 4, Issue 1, hlm. 30.

¹⁴Lee M Ritterband, Frances P Thorndike, Daniel J Cox, Boris P Kovatchev dan Linda A Gonder-Frederick, *A Behavior Change Model For Internet Intervention*, *Ann Behav Med*, Vol 38, No. 1, 2009, Hlm. 18-27.

¹⁵*United Nation Foundation and Vodafone Foundation, M-Health for Development, The Opportunity of Mobile Technology for Health Care in the Developing World*, 2009, Hlm. 9.

¹⁶John-Harment Valk, Ahmed T. Rashid dan Laurent Elder, *Using Mobile Phones to Improve Educational Outcomes: An Analysis of evidence from Asia*, *International Review of Research in Open and Distance Learning*, Volume 11, No. 1, 2010, Hlm. 132.

bangsa Indonesia. Pembangunan kesehatan bertujuan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sebagai modal pembangunan nasional, yang pada dasarnya adalah pembangunan seluruh rakyat Indonesia. Masalah kesehatan merupakan masalah yang sangat rumit yang saling berhubungan dengan masalah non-kesehatan. Banyak faktor yang mempengaruhi kesehatan, termasuk pengetahuan dan sikap masyarakat tentang respon penyakit.¹⁷

Dalam dunia kesehatan masalah kesehatan masyarakat masih menjadi beban dan tantangan utama serta menjadi perhatian pemerintah. Hal ini disebabkan masih rendahnya kesadaran masyarakat, tidak merata dan rendahnya tingkat kesehatan masyarakat, terutama pada masyarakat ada di pemukiman kumuh. Banyak masalah kesehatan masyarakat dapat diakibatkan oleh perilaku yang lalai dan faktor kondisi lingkungan.¹⁸

Pembangunan kesehatan bertujuan meningkatkan kesadaran akan keinginan dan kemampuan masyarakat untuk hidup dengan sehat guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya sebagai investasi pengembangan sumber daya manusia yang bermanfaat bagi masyarakat dan perekonomian. Pembangunan kesehatan juga terdapat dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2020-2024, berdasarkan Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 18 Tahun 2020 Lampiran 1 tentang arah kebijakan RPJMN (Rencana Pembangunan

¹⁷ Notoatmodjo, S., 2003, Ilmu Kesehatan Masyarakat, Rineka Cipta, Jakarta.

¹⁸ Fauziah ., Nur A., Asmaul H., Nuzulul R., dan Faradilla S., 2022, Edukasi tentang Isu Permasalahan Kesehatan di Indonesia Bersama Calon Tenaga Kesehatan Masyarakat Provinsi Aceh, Jurnal Pengabdian Masyarakat (Kesehatan), Universitas Ubudiyah Indonesia Indonesia, Vol. 4 No. 1, hlm. 40

Jangka Menengah Nasional) bidang kesehatan tahun 2020-2024 yaitu peningkatan pelayanan kesehatan menuju jaminan kesehatan semesta khususnya dengan penguatan pelayanan kesehatan dasar, dilaksanakan dengan penguatan upaya promotif dan preventif, serta melalui pemanfaatan inovasi dan teknologi di bidang kesehatan.¹⁹

Salah satu tujuan utama RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2020-2024 adalah menurunkan prevalensi *wasting* dan *stunting* pada balita. Karena gizi kurang masih menjadi masalah di Indonesia, gizi kurang yang meliputi kelompok malnutrisi seperti *underweight*, *wasting*, *stunting*, dan defisiensi mikronutrien.²⁰ Gizi memiliki peranan penting dalam perkembangan fisiologis, kemampuan berbahasa, kesadaran sosial dan intelegensi seorang anak. Jika seseorang tidak memenuhi kebutuhan gizi sebagaimana mestinya, maka akan berdampak pada aspek kesehatan berupa *Stunting*. *Stunting* merupakan permasalahan yang berdampak pada kehidupan sosial masyarakat termasuk Indonesia. *Stunting* mulai terjadi pada awal kelahiran yang mengalami kurang gizi sehingga dapat mengganggu proses pertumbuhan yang optimal.²¹

Kebijakan untuk mencegah *stunting* merupakan bagian dari agenda global, karena *stunting* itu sendiri merupakan masalah yang dihadapi oleh global. Salah satu upaya global dalam mencegah *stunting* ialah dengan Gerakan *Scaling Up Nutrition*

¹⁹ Alvian Dicky Irawan, 2022, Gambaran Analisis Pembangunan Kesehatan di Indonesia pada Masa Pandemi Covid-19, Jurnal Kesehatan Tambusai, Volume 3 No. 3, hlm. 369-373.

²⁰ Rencana Aksi Program kesehatan Masyarakat Tahun 2020-2025, Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan Indonesia, 2020, hlm. 10-11.

²¹ Agustuti Handayani, Evaluasi Kebijakan Program 1000 Hari Pertama Kehidupan Dalam Penanganan *Stunting* Pada Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung, Skripsi, Universitas Bandar Lampung, 2019, Hlm. 6.

(SUN) di bawah PBB (Perserikatan Bangsa - bangsa) akibat gagalnya pencapaian *Millennium Developments Goals* (MDGs) salah satunya ialah pengentasan kemiskinan dan kelaparan. Indonesia tergabung dalam Gerakan *Scaling Up Nutrition* (SUN) pada Desember 2011, sedangkan *Millennium Goals* sendiri diimplementasikan pada tahun 2000-2015 dan dilanjutkan dengan *Sustainable Developments Goals* (SDGs) untuk tahun 2015-2030. Mengurangi *stunting* merupakan salah satu tujuan *Sustainable Developments Goals* (SDGs) yang merupakan tujuan ke-2 antara lain mengakhiri kelaparan dan memerangi malnutrisi, juga merupakan tujuan dari *World Health Organization* (WHO) untuk mengurangi angka *stunting* hingga 40% pada tahun 2025.²²

Malnutrisi atau kurang gizi menyumbang sepertiga dari kematian anak di seluruh dunia. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memperkirakan 54 persen kematian anak disebabkan oleh kekurangan gizi. Di Indonesia, permasalahan gizi kini menjadi penyebab lebih dari 80 persen kematian pada anak. Pada tahun 2013 prevalensi gizi buruk di Indonesia masih menjadi masalah kesehatan masyarakat yang menjangkau masyarakat luas.²³ *Stunting* merupakan masalah kesehatan yang masih dihadapi oleh Indonesia. Indonesia pernah menjadi negara ketiga dengan angka prevalensi tertinggi di Asia pada tahun 2017 menurut data *World Health Organization* (WHO).²⁴ Hasil studi Status Gizi balita Indonesia (SSGBHI) tahun 2019 menunjukkan

²² Irma Fitriana Ulfah dan Arief Budi Nugroho, 2020, Menilik Tantangan Pembangunan Kesehatan di Indonesia: Faktor Penyebab *Stunting* di Kabupaten Jember, *Sospol: Jurnal Sosial Politik*, Vol. 6 No. 2 hlm. 200-212.

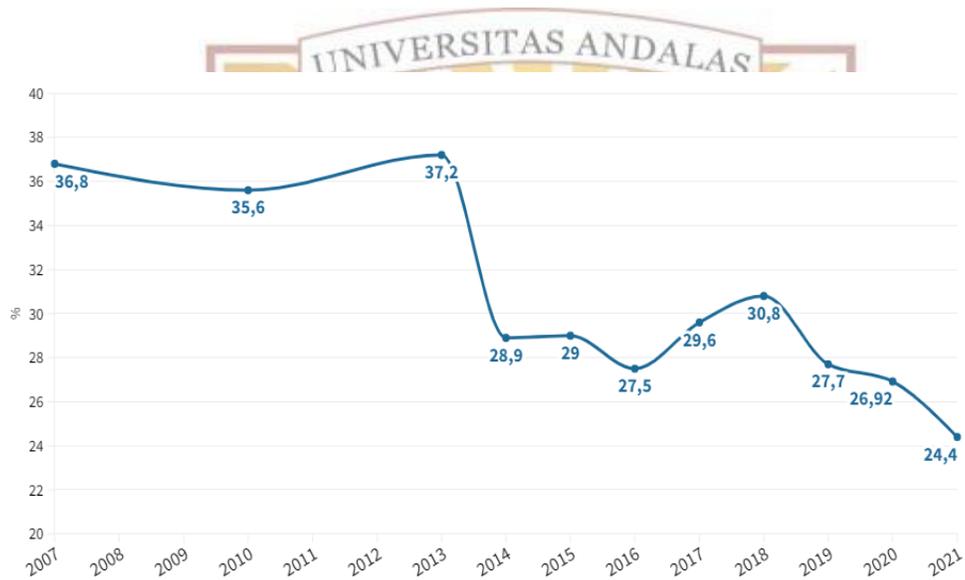
²³ Depkes RI, 2013, Riset Kesehatan Dasar, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI, Jakarta.

²⁴ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2020, Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2019, Jakarta.

terjadinya penurunan prevalensi *stunting* dari 30,8% tahun 2018 menjadi 27,67% tahun 2019.²⁵ Meskipun angkanya menurun, angka ini masih tergolong tinggi karena angka *stunting* yang diperbolehkan WHO adalah 20%.²⁶

Gambar 1. 1

Prevalensi *Stunting* Balita di Indonesia (2007 - 2021)



Sumber: Kementerian Kesehatan RI (Kemenkes), 2022



Berdasarkan pada Gambar 1.1 hasil Studi Gizi Indonesia (SSGI) yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes), prevalensi balita yang mengalami *stunting* di Indonesia sebesar 24,4% pada tahun 2021, sehingga hampir seperempat balita di Indonesia yang mengalami *stunting*. Walaupun demikian, persentasenya mengalami penurunan dibandingkan beberapa tahun lalu. Pada tahun 2020, prevalensi

²⁵ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2021, Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2020, Jakarta.

²⁶ Fauziah, op.cit., hlm 41.

stunting di Indonesia diprediksi sebesar 26,92%. Prevalensi *stunting* di Indonesia sendiri sempat melonjak menjadi sebesar 37,2% pada 2013 dan 30,8% pada 2018. Namun, angkanya cenderung mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Pemerintah menargetkan prevalensi *stunting* di Indonesia turun menjadi di bawah 14% pada 2024. Untuk itu dibutuhkan target penurunan prevalensi *stunting* setiap tahun berkisar 2,7%.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Kementerian Kesehatan menerapkan langkah-langkah khusus untuk mengatasi penyebab langsung dari *stunting*, seperti penyediaan nutrisi, pencegahan penyebaran penyakit menular dan penyediaan perawatan terpadu untuk balita yang sakit. Dan semua Provinsi di Indonesia mengikuti penerapan yang dilakukan untuk menargetkan prevalensi di Indonesia turun di tahun 2024, termasuk Provinsi Sumatera Barat.

Sumatera Barat ialah salah satu Provinsi dengan angka *stunting* sebesar 29,9%. Meskipun angka ini di bawah rata-rata nasional, namun masih tinggi jika dibandingkan dengan standar WHO 20%.²⁷ Masalah gizi di Provinsi Sumatera Barat terutama angka prevalensi *stunting* di Sumatera Barat masih cukup tinggi yaitu pertahun 2015-2017 mencapai 19,4% dan 21,3%.²⁸

Tabel 1. 1

²⁷Ikhsan, M. (2023). Pelaksanaan Komunikasi Kebijakan Dalam Pencegahan *Stunting* Di Kota Padang. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 7(1).

²⁸Gusmiyati, G. (2022). Evaluasi Kebijakan Pencegahan *Stunting* di Pasaman Barat. *Journal Of Policy, Governance, Development and Empowerment*, 2(3), 299-304.

Status Gizi Balita Provinsi Sumatera Barat dan Nasional berdasarkan PSG

Tahun 2015-2017

Tahun	TB/U, Sangat pendek, Pendek <20%
2015	27,6
2016	25,5
2017	30,6

Sumber: Profil Kesehatan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018, 2018.

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat diketahui bahwa prevalensi *stunting* di Sumatera Barat mengalami penurunan dan kenaikan pada rentang tahun 2015-2017 dan nilai angka *stunting* yang tercatat masih cukup tinggi di atas 20% berdasarkan standar ketentuan *World Health Organization* (WHO).

Saat ini Pemerintah masih berupaya untuk mengurangi maupun mencegah terjadinya kasus *stunting* di masyarakat, sehingga *stunting* termasuk dalam Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) pada Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, dengan tujuan menurunkannya prevalensi *stunting* balita hingga 14% menggunakan pendanaan dari APBN sebanyak 187,1 Triliun.²⁹ Dengan adanya rencana ini pemerintah berharap dapat menekan angka kasus *stunting* yang terjadi di masyarakat di setiap Provinsi di Indonesia

²⁹Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

Gambar 1. 2

Prevalensi Status Gizi (TB/U pada Anak 0-59 (Balita) Bulan Provinsi Sumatera Barat menurut Kabupaten/Kota

Kabupaten/kota	Status Gizi (TB/U)				N terukur
	Stunting		Normal		
	%	95% CI	%	95% CI	
Kepulauan Mentawai	42,7	33,5 – 52,4	57,3	47,6 – 66,5	38
Pesisir Selatan	30,1	23,5 – 37,7	69,9	62,3 – 76,5	195
Solok	31,7	24,7 – 39,6	68,3	60,4 – 75,3	140
Sijunjung	30,4	22,9 – 39,2	69,6	60,8 – 77,1	107
Tanah Datar	23,5	16,2 – 32,9	76,5	67,1 -83,8	111
Padang Pariaman	20,2	15,2 – 26,3	79,8	73,7 – 84,8	165
Agam	25,2	18,2 – 33,7	74,8	66,3 – 81,8	178
Lima Puluh Kota	27,5	17,1 – 41,1	72,5	58,9 – 82,9	158
Pasaman	33,9	27,0 – 41,6	66,1	58,4 – 73,0	127
Solok Selatan	33,6	26,1 -42,1	66,4	57,9 – 73,9	75
Dharmasraya	25,7	20,0 – 32,4	74,3	67,6 – 80,0	114
Pasaman Barat	30,3	23,8 – 37,8	69,7	62,2 - 76,2	211
Padang	20,1	15,4 – 25,7	79,9	74,3 – 84,6	349
Solok	19,9	14,5 – 26,8	80,1	73,2 – 85,5	30
Sawah Lunto	22,4	16,2 – 30,2	77,6	69,8 – 83,8	26
Padang Panjang	14,3	9,5 – 21,0	85,7	79,0 – 90,5	22
Bukittinggi	22,5	14,0 -34,2	77,5	65,8 – 86,0	49
Payakumbuh	21,9	16,6 – 28,4	78,1	71,6 – 83,4	58
Pariaman	20,4	14,9 – 27,5	79,6	72,5 – 85,1	34
TOTAL	26,4	24,4 – 28,4	73,6	71,6 – 75,6	2.186

Sumber: Profil Kesehatan 2019



Berdasarkan Gambar 1.2 prevalensi *Stunting* di Provinsi Sumatera Barat lebih rendah dari angka Nasional yaitu (26,4 %). Terdapat lima kabupaten/kota yang memiliki prevalensi *stunting* di atas angka Provinsi yaitu Kabupaten/Kota Kepulauan Mentawai (42,7 %), Pasaman (33,9 %), Solok Selatan (33,6 %), Solok (31,7 %), dan Sijunjung (30,4 %). Sedangkan lima kabupaten/kota Padang panjang (14,3%), Solok

(19,9%), Padang (20,1%), Padang Pariaman (20,2%) dan Pariaman (20,4%).³⁰ Jika melihat angka *stunting* di Kota Padang memang terlihat rendah, namun masih tinggi jika melihat jumlah kasus balita. Hal ini karena belum terlaksananya koordinasi program *stunting* secara optimal di Pemerintah Kota Padang.³¹ Faktor yang dapat menimbulkan terjadinya *stunting* pada balita disebabkan pola asuh, kebersihan dan kesehatan yang tidak seharusnya, serta perilaku personal *hygiene* dan sanitasi lingkungan.³² Berdasarkan data dari Penilaian Status Gizi (PSG) Kota Padang pada tahun 2017 kejadian *stunting* dan *severe stunting* sebesar 20,25%. Dimana terdapat lima kecamatan dengan angka kejadian *stunting*, dan Kecamatan Padang timur tertinggi kedua setelah Kecamatan Pauh.³³

“Saat ini Kota Padang berada di level 11,5%, angka itu memang cukup jauh dari yang ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sebagai daerah yang rawan *stunting* yakni 20%. Namun pada tahun 2021 ini, pemerintah pusat menetapkan Kota Padang sebagai lokus *stunting*, Karena adanya prediksi angka *stunting* di tiap daerah akan meningkat di masa Pandemi Covid-19 ini.” (Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang, dr. Ferimulyani Hamid, M. Biomed dalam Antara News pada tanggal 4 April 2021).

³⁰Sudikno, dkk., Laporan Akhir penelitian Studi Kasus Gizi Balita di Indonesia Tahun 2019, Pusat Litbang Upaya Kesehatan Masyarakat Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI, 2019.

³¹Iqbal, M., & Yusran, R. (2021). Upaya Konvergensi Kebijakan Pencegahan *Stunting* di Kota Padang. *Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 109-116.

³² Hendrayati dan Ramlan Asbar, Analisis Faktor Determinan Kejadian *Stunting* Pada Balita Usia 12 Sampai 60 Bulan, *Media Gizi Pangan*, Vol. 25, Edisi 1, 2018, Hlm. 70.

³³Profil Kesehatan Kota Padang 2017.

Berdasarkan wawancara di atas walaupun Kota Padang bukan termasuk daerah yang memiliki kasus *stunting* terbanyak, Kota Padang masih perlu mendapat perhatian dalam penanganan *stunting*. Karena keberadaan *stunting* sendiri diharapkan mencapai angka 0 di setiap daerah, termasuk Kota Padang. Maka dari itu Kota Padang dalam penanganan *stunting* melakukan peningkatan pelayanan kesehatan berupa inovasi dan program-program yang mendukung berkurangnya kejadian *stunting* di Kota Padang.

Penyebab utama meningkatnya jumlah anak *stunting* di Indonesia adalah karena rendahnya kesadaran pencegahan *stunting*, kebijakan yang tidak konsisten dalam pencegahan *stunting*, dan masalah komunikasi terkait perubahan perilaku di tingkat individu, masyarakat dan pelayanan kesehatan.³⁴ Pemerintah memiliki peranan yang penting dalam menyediakan pelayanan kepada seluruh warga negaranya, pelayanan publik yang diberikan pemerintah merupakan salah satu hal penting yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Masyarakat sering menuntut adanya pelayanan yang berkualitas, hal ini membuat pelayanan publik menjadi isu yang semakin sentral dan strategis.³⁵

Pelayanan publik dapat didefinisikan sebagai segala bentuk pelayanan sektor publik yang disediakan oleh pejabat pemerintah berupa penyediaan barang atau jasa sebagai jawaban atas kebutuhan masyarakat, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁶ Dan untuk memastikan agar semua masyarakat mendapatkan

³⁴ Kementerian Kesehatan RI. 2021. Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku Percepatan Pencegahan *Stunting*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.

³⁵Citra, loc.cit.

³⁶Endang, loc.cit.

kesehatan yang baik, maka pemerintah perlu menyusun program pelayanan kesehatan yang juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara berinovasi, seperti salah satu Puskesmas di Kota Padang yaitu Puskesmas Andalas.

Inovasi pelayanan publik adalah ide baru yang diterapkan pertama kali untuk menginisiasi atau memperbaiki proses suatu produk atau proses suatu pelayanan yang dilakukan oleh suatu organisasi publik untuk memenuhi kebutuhan dan membawa manfaat bagi pengguna layanan dan organisasi.³⁷ Hal ini mendorong Puskesmas Andalas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat menciptakan inovasi yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan berupa sebuah aplikasi *mobile* cegah *stunting* bernama Ayo Ceting.

Hal ini sesuai dengan Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2017 tentang Strategi *E-Kesehatan Nasional* dalam pasal 3 dengan misi membangun *e-kesehatan* sebagai bagian integral dari transformasi dan peningkatan kualitas, aksesibilitas dan kesinambungan pelayanan kesehatan di Indonesia dengan menumbuhkan dan menerapkan inovasi *e-kesehatan* serta menyediakan sistem elektronik kesehatan yang efektif, handal, aman dan inovatif untuk mendukung seluruh komponen sistem kesehatan.³⁸ Menurut Barnett penggunaan *Mobile Smartphone*

³⁷CindyAnggraeny, Inovasi Pelayanan Kesehatan dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan di Puskesmas Jagir Kota Surabaya, *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, Vol. 1, No. 1, 2013, Hal. 89.

³⁸Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2017 tentang Strategi *E-Kesehatan Nasional*.

memberikan peluang inovatif dalam memantau pertumbuhan berbasis masyarakat dan efektif dalam menanggulangi kekurangan gizi pada anak.³⁹

Puskesmas Andalas ialah unit penyelenggaraan pelayanan kesehatan terdepan di daerah Kecamatan Padang Timur. Salah satu permasalahan kesehatan yang dialami warga di daerah kerja Puskesmas Andalas merupakan *stunting*, ialah sebesar 26,9 persen di tahun 2018. Angka ini jauh melebihi dua kali lipat permasalahan *stunting* Kota Padang ialah 11. 06 persen. *Stunting* ialah keadaan dimana bayi mempunyai panjang ataupun besar tubuh yang kurang bila dibanding dengan usia. Keadaan ini diakibatkan oleh banyak faktor semacam keadaan sosial ekonomi, gizi ibu hamil, balita yang sakit serta minimnya konsumsi gizi pada balita. Bayi yang *stunting* ke depannya akan menghadapi kesusahan dalam menggapai pertumbuhan fisik serta kognitif yang maksimal. Keadaan ini jika terus dibiarkan akan berakibat kurang baik terhadap mutu generasi penerus bangsa, sehingga dibutuhkan upaya sungguh- sungguh buat memusatkan penyusutan *stunting*. Maka Puskesmas Andalas menciptakan pelayanan terkait *stunting* dengan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dengan tujuan dapat mengurangi kasus *stunting* di Kota Padang berupa Inovasi Ayo Ceting (Cegah *Stunting*).

Ayo Ceting ialah program pencegahan *stunting* yang berupa kolaborasi dari pemberdayaan masyarakat dengan penerapan *e-government* untuk meningkatkan

³⁹Inka Barnett, Yosellina, Sigit Sulisty, Barbara Befani, Kencana Karisari, Shumona Sharmin dan Devianna Dewi, *Mixed – Method Impact Evaluation of A Mobile Phone Application for Nutrition Monitoring in Indonesia*, The Institute of Development Studies, 2016, Hlm. 7.

kualitas pelayanan kesehatan publik, terutama bagi kelompok sasaran seperti ibu hamil, ibu bayi dan ibu balita yang dibuat pertama kali pada tahun 2019.

Program ini bertujuan untuk mencegah kasus *Stunting* di wilayah kerja Puskesmas Andalas melalui peningkatan pengetahuan serta pemahaman masyarakat mengenai *stunting* dan pencegahannya, meningkatkan kualitas gizi serta meningkatkan akses layanan gizi bagi ibu hamil, bayi dan balita. Berdasarkan hasil wawancara, Inovasi Ayo Ceting dicetuskan oleh dr. Ulfia yang merupakan dokter gizi dan anak yang ada di Puskesmas Andalas, ini berkaitan dengan salah satu indikator yang ada pada teori proses pelaksanaan inovasi menurut Arundel dkk yaitu Sumber ide-ide Inovasi (*Source of the ideas of Innovations*).

Program kegiatan pertama yang ada di dalam Ayo Ceting ialah Grup *Whatsapp* Ibu hamil yang merupakan sarana komunikasi dan diskusi tentang kesehatan dan gizi selama kehamilan, termasuk ibu hamil di kabupaten Padang Timur, terutama yang jarang dipantau oleh tenaga kesehatan. Setiap minggu diberikan materi kehamilan oleh dokter Puskesmas di dalam grup, sumber daya yang ikut terlibat dalam kegiatan tersebut adalah masyarakat, kader, bidan penanggungjawab wilayah didukung oleh petugas gizi, dokter umum, dokter spesialis kandungan dan spesialis anak. Materi kehamilan diberikan setiap minggu oleh dokter Puskesmas dan diadakan “*Live Discussion*” setiap bulan dengan Dokter Spesialis yang topik diskusinya diambil dari hasil *voting* anggota grup. Sumber daya yang terlibat di wilayah kerja Puskesmas Andalas merupakan sumber daya suka rela sebagai bentuk pengabdian terhadap masyarakat.

Kegiatan kedua ialah dengan sasaran anak-anak usia di bawah 5 tahun, yang diwadahi dengan keberadaan rumah gizi. Rumah gizi ialah wadah untuk mengintervensi bayi dan balita yang mengalami gizi kurang dan gizi buruk agar tidak mengalami *stunting*. Rumah gizi didirikan atas inisiasi masyarakat serta edukasi pola asuh.

Gambar 1. 3

Dokumentasi Aktivitas Rumah Gizi



Sumber: Puskesmas Andalas, 2023.

Berdasarkan gambar 1.3 di atas, dapat dilihat aktivitas yang dilakukan di rumah gizi berupa edukasi kepada masyarakat terkait pola gizi makanan kepada bayi dan balita serta pola asuh yang baik kepada anak. Anak-anak akan diberikan makanan bergizi sesuai dengan kebutuhan, asupan vitamin dan akan diukur perkembangan tinggi

dan berat badan serta pemeriksaan kesehatan secara rutin selama program berlangsung. Selain itu orang tua akan ikut mendampingi anak selama pelaksanaan program. Hal ini diharapkan dapat membina masyarakat agar lebih memperhatikan pemenuhan gizi kepada anak. Sekarang terdapat rumah gizi di kelurahan Parak Karakah, Jati Baru dan Andalas.

Gambar 1. 4

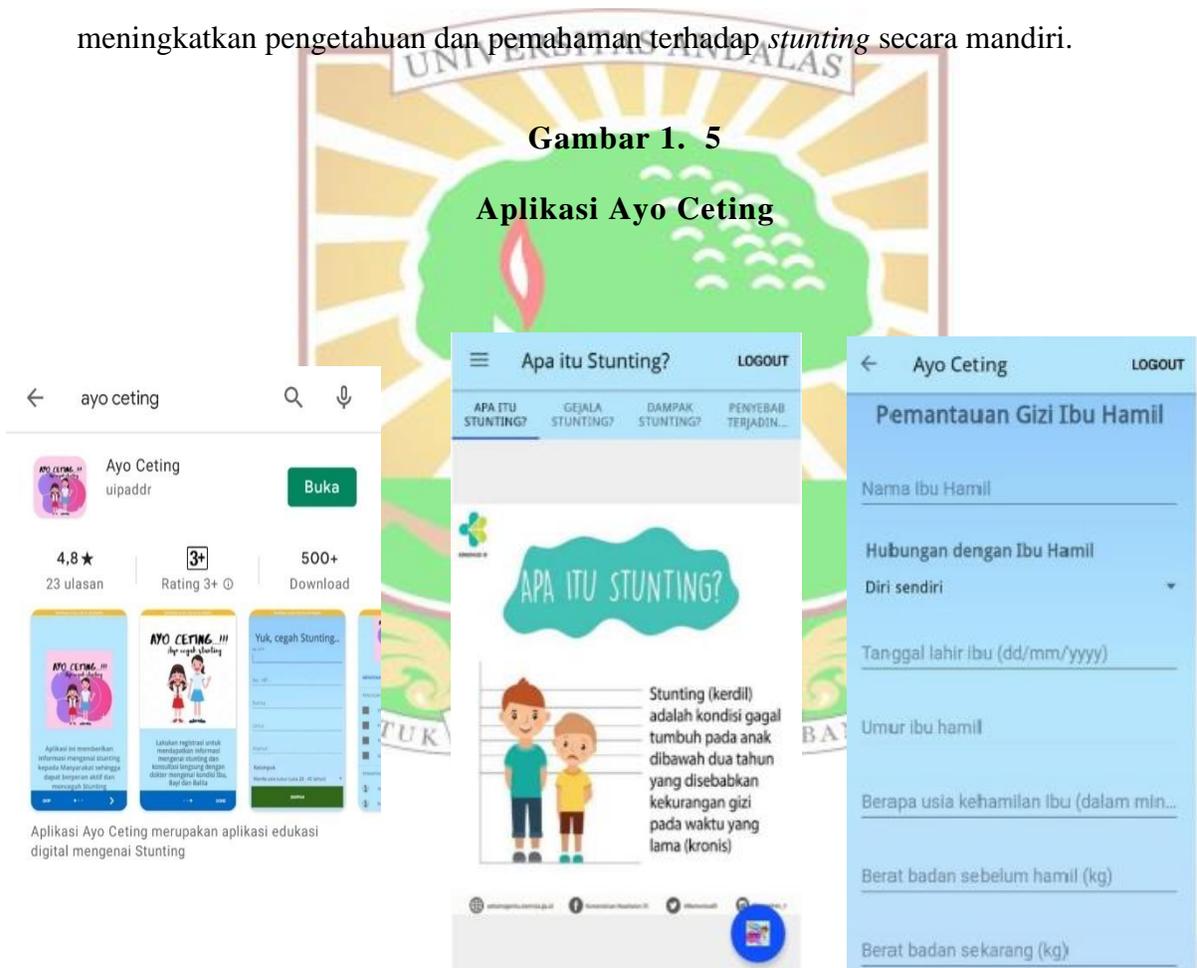
Dokumentasi Bibit Ikan dan Sayur di Rumah Gizi



Sumber: Puskesmas Andalas, 2023.

Berdasarkan Gambar 1.4 dapat dilihat bahwa dalam pengoperasian rumah gizi ada beberapa sumber daya yang terlibat yaitu tokoh masyarakat, dokter, kader, ahli gizi, psikolog dan masyarakat. Dan dalam praktek pengolahan makanan, bahan makanan yang digunakan merupakan bahan yang ditanam dan dibudidayakan di rumah gizi maupun di rumah warga serta ada berupa sumbangan dari masyarakat. Dengan kegiatan berupa rumah gizi ini diharapkan adanya perubahan sikap maupun perilaku ibu atau pengasuh terhadap pola makan anak dan pola asuh yang benar.

Ketiga yaitu berupa salah satu implementasi *e-government* yang dilakukan Puskesmas Andalas dalam bidang pelayanan kesehatan adalah penggunaan aplikasi Ayo Ceting sebagai alat pencegahan *stunting* digital yang membantu dalam pencatatan dan pemantauan gizi ibu hamil dan bayi serta balita. Dalam aplikasi Ayo Ceting juga terdapat layanan pendaftaran dan konsultasi secara *online* dengan dokter. Aplikasi Ayo Ceting ini memiliki tujuan memberdayakan masyarakat agar dapat secara aktif meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terhadap *stunting* secara mandiri.



Sumber: Playstore

Berdasarkan pada Gambar 1.5 merupakan penampilan Aplikasi Ayo Ceting, Di dalam aplikasi Ayo Ceting ini terdapat beberapa fitur atau program kegiatan di

dalamnya yaitu konsultasi secara *online* dengan dokter dan *digital education*. Aplikasi Ayo Ceting ini dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat dan telah dapat diunduh di *Playstore*. Tujuan utama dari adanya aplikasi ini ialah untuk pencegahan *Stunting* agar dapat dilakukan dengan maksimal serta dapat memantau tumbuh kembang bayi. Dengan aplikasi Ayo Ceting ini proses edukasi masyarakat dilakukan dengan lebih atraktif, menarik dan mudah.



Sumber: Aplikasi Ayo Ceting

Berdasarkan Gambar 1.6 merupakan tampilan menu-menu yang tersedia di dalam Aplikasi Ayo Ceting yang dapat diakses dan digunakan oleh masyarakat. *Digital education* yang merupakan media edukasi dengan sistem digital mengenai pencegahan *stunting*, dengan fitur - fitur pemantauan dan pencatatan gizi bayi, balita dan ibu hamil serta materi informasi terkait *stunting* di dalam aplikasi ini melayani pendaftaran serta

konsultasi *online* langsung dengan dokter, aplikasi ini dapat diunduh masyarakat di *Playstore Android*. Dengan adanya aplikasi ini proses edukasi dapat dilakukan dengan lebih atraktif, menarik dan mudah diakses kapan saja, dimana saja serta oleh siapa saja.



Sumber: Aplikasi Ayo Ceting

Pada Gambar 1.7 dapat dilihat bahwa terdapat beberapa dampak positif dari adanya aplikasi cegah *stunting* ini yaitu memberikan pengetahuan kepada masyarakat,

masyarakat dapat meng-*upload* sendiri berat anak di aplikasi, dan masyarakat dapat mengukur berat anak dimana saja seperti bidan atau klinik, prosedur jadi lebih efektif, dan Puskesmas memiliki data masyarakat secara *up to date*.

Aplikasi ini memudahkan masyarakat karena dapat diakses dimana pun tanpa perlu bertatap muka secara langsung. Di dalam aplikasi ini terdapat informasi yang dibutuhkan oleh ibu menyusui, panduan menu makanan sehat, pola hidup sehat dll. Masyarakat pengakses Ayo Ceting dapat berinteraksi langsung dengan dokter yang siap menjawab keluhan dan pertanyaan, karena aplikasi ini terhubung langsung dengan nomor *WhatsApp* dokter. Sebelum adanya aplikasi ini sistem pelayanan terkait ibu hamil dan ibu menyusui dilakukan dengan cara pasien langsung mendatangi Puskesmas untuk melakukan konsultasi atau ingin menjalani pemeriksaan.

“kami menyediakan layanan konsultasi online di Aplikasi ini, lalu alasan awal inovasi ini diciptakan ialah karena berkurangnya masyarakat yang datang ke Posyandu sedangkan kita membutuhkan data-data anak untuk mengidentifikasi kejadian stunting, karena alasan itu kita mencoba menciptakan aplikasi Ayo Ceting ini.” (Hasil wawancara yang dilakukan dengan Penanggung Jawab Inovasi Ayo Ceting dr. Ulfia Izzati di Puskesmas Andalas pada tanggal 13 Januari 2023).

Hal ini senda dengan yang diungkapkan oleh Kepala Puskesmas Andalas dalam wawancara sebagai berikut:

“kami menawarkan ahli gizi dan 10 bidan untuk berkonsultasi online. Saat ini, 400 orang di Padang Timur telah mengunduh aplikasi Ayo Ceting. Dan selama pandemi kami memiliki 400 pengguna baru yang belum pernah ke puskesmas atau posyandu.” (Hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Puskesmas Andalas Mela Aryati di Puskesmas Andalas pada tanggal 22 Juni 2021).

Dengan situasi saat ini permasalahan global pandemi *Covid-19* yang menelan banyak korban, pemerintah terus berupaya untuk menanggulangi pandemi. Pandemi secara langsung berdampak pada kehidupan masyarakat berupa perubahan gaya hidup, budaya, politik, sosial, ekonomi dan hidup. Pandemi sendiri juga telah berdampak pada perubahan pola kerja di seluruh dunia, dan termasuk pelayanan publik di dalamnya.⁴⁰ Aplikasi Ayo Ceting ini sangat relevan di era pandemi Covid-19, sehingga berpotensi untuk diadopsi secara nasional.⁴¹ Hal ini mendorong keberadaan Aplikasi Ayo Ceting dapat mengurangi kontak antara petugas puskesmas dengan pasien sesuai dengan program *social distancing*, membantu Ibu hamil dan Ibu menyusui untuk mengurangi kontak langsung dan dapat memanfaatkan pelayanan yang ada di aplikasi Ayo Ceting tanpa harus datang ke Puskesmas.

“Kelompok sasaran dari aplikasi ini yang merupakan ibu hamil, ibu menyusui serta wanita usia subur yang masih minim pengetahuan tentang makanan bergizi yang seharusnya dikonsumsi oleh anak pada usia 1000 hari pertamanya. Apabila kebutuhan gizi tersebut tidak tercukupi maka akan mempengaruhi tumbuh kembang anak. Faktor terjadinya *stunting* pada anak dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu pola makan, pola asuh dan sanitasi.”(Hasil wawancara dengan Dokter Gizi dan Anak selaku penanggung jawab Inovasi Ayo Ceting dr. Ulfia Izzati di Puskesmas Andalas pada tanggal 12 November 2020).

Berdasarkan yang telah disampaikan bahwa penyebab terjadinya *stunting* ialah pola makan, pola asuh dan sanitasi, maka dalam mengurangi atau mencegah adanya

⁴⁰Wisber Wiryanto, Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan di Indonesia Selama *Pandemi Covid-19*, Konferensi Nasional Ilmu Administrasi, Vol 4, No 1, 2020, hlm. 143.

⁴¹TOP 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2020, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

stunting di Kota Padang tentu perlu didukung dan dibantu oleh berbagai sektor. Salah satunya dari sektor kesehatan sendiri memberikan sebuah aplikasi cegah *stunting* yang memiliki panduan dalam memberikan asupan makanan bergizi kepada anak, dapat diakses kapan pun dan dimana pun serta dapat melakukan konsultasi secara langsung dengan dokter yang terhubung via aplikasi tersebut.

“Inovasi Ayo Ceting ini masuk dalam Top 99 Nasional Sinovik Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2020, hal ini juga diterapkan pada puskesmas lain di Kota Padang, sehingga upaya pencegahan *stunting* dapat lebih maksimal. Atas nama pemerintah Kota Padang, saya mendorong inovasi untuk mempermudah kehidupan masyarakat.” (Hasil wawancara dengan Walikota Padang Mahyeldi dalam Antara News pada tanggal 9 Juli 2020).

Berdasarkan wawancara di atas, Sinovik merupakan Sistem Informasi Pelayanan Publik, yaitu sebuah *website* dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia yang menggelar ajang kompetisi Instansi pemerintah dalam membuat inovasi pelayanan publik. Melalui *website* tersebut instansi pemerintahan dapat mendaftarkan inovasi mereka untuk diikuti pada kompetisi inovasi instansi pemerintahan se-Indonesia untuk mendapatkan penghargaan sebagai inovasi terbaik.

Tabel 1. 2

Dampak Penerapan Ayo Ceting

No.	Indikator Keberhasilan	Sebelum	Sesudah
1	Penurunan Sunting	26.9%	12%

2	Tingkat pengetahuan dan pemahaman ibu hamil dan bayi balita	Sedang	Baik
3	Perbaikan status gizi pasca diintervensi	18 kasus gizi buruk	4 kasus gizi buruk
4	Peningkatan jumlah kunjungan ke layanan Gizi	125	289

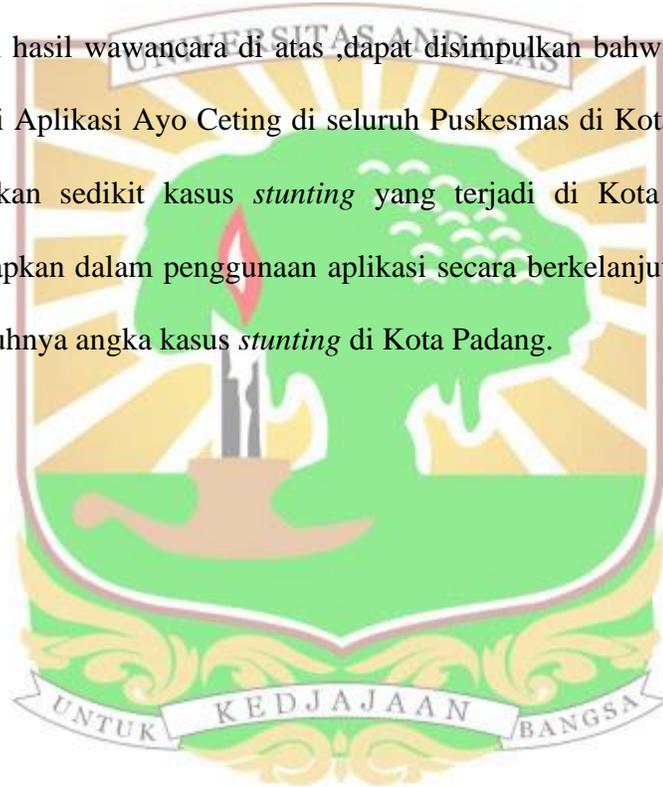
Sumber: Buku TOP 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2020

Berdasarkan Tabel 1.2 Aplikasi Ayo Ceting memiliki dampak cukup signifikan, sehingga dapat dilihat lebih jauh manfaatnya bagi ibu hamil, ibu bayi dan ibu balita dengan keterlibatan masyarakat dan pemerintah. Dengan adanya Aplikasi Ayo Ceting ibu hamil dan menyusui dapat lebih mudah mengakses informasi terkait dengan gizi yang dibutuhkan bayi untuk menghindari *stunting* serta dapat secara langsung berkonsultasi dengan dokter secara *online*. Pemberdayaan terhadap ibu hamil dan menyusui terkait pengetahuan tentang gizi bayi dan balita dapat dilakukan dengan aktif dan mudah melalui aplikasi Ayo Ceting, sehingga sedikit demi sedikit dapat mengedukasi masyarakat perihal pentingnya pengetahuan tentang gizi. Ayo ceting sudah diadopsi untuk dilaksanakan di seluruh Puskesmas Kota Padang sesuai dengan

Perwako No.64 Tahun 2020 dan SK Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang
No.800/1935A/Sekre-Umum/2019.⁴²

“Menurut data pusat, pada tahun 2021 akan ada sekitar 3.200 anak yang menderita *stunting* dan gizi buruk. Namun, setelah kami validasi di lapangan tahun ini, hanya ada 1.002.” (Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang Srikurnia Yati dalam Regional Kompas pada tanggal 31 Agustus 2022)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa dengan adanya replikasi Aplikasi Ayo Ceting di seluruh Puskesmas di Kota Padang dapat menurunkan sedikit kasus *stunting* yang terjadi di Kota Padang. Sehingga diharapkan dalam penggunaan aplikasi secara berkelanjutan dapat menekan sepenuhnya angka kasus *stunting* di Kota Padang.



⁴²Ibid. Hlm. 189.

Gambar 1. 8

Brosur Ayo Ceting



Sumber: Puskesmas Andalas

Stunting banyak terjadi pada masyarakat ekonomi ke atas, pada kelompok miskin memang wajar, namun pada kelompok ekonomi menengah ke atas terjadi karena ketidaktahuan dan tidak paham perihal gizi. Juga terdapat beberapa kendala dari aplikasi cegah *stunting* ini yaitu sosialisasi masih kurang, belum dimanfaatkan sepenuhnya secara optimal, sosialisasi hanya dilakukan lewat brosur seperti pada

Gambar 1.8⁴³. Kalau hanya lewat brosur dan sosialisasi terkadang tidak terlalu di perhatikan oleh masyarakat, sehingga dengan adanya aplikasi dapat diakses kapan saja, dimana saja, dapat dibaca serta dilihat berulang-ulang. Sebelum aplikasi ini secara resmi di luncurkan kepada masyarakat, aplikasi ini diujikan pemakaiannya kepada pegawai dan kelompok ibu hamil yang ada di puskesmas andalas sendiri.⁴⁴

Berbagai fenomena di atas terkait inovasi pelayanan publik di bidang kesehatan di Puskesmas Andalas Kota Padang, salah satunya dapat diketahui bahwa inovasi pelayanan kesehatan yang memanfaatkan kemajuan teknologi informasi yang diluncurkan oleh Puskesmas Andalas berupa aplikasi berbasis *mobile* dengan tujuan mencegah bertambahnya jumlah kasus *stunting* yang bernama Ayo Ceting ini sukses meraih prestasi dalam TOP 99 Inovasi Pelayanan Publik 2020 melalui SINOVIK.

Perlu diketahui bahwa dalam pelaksanaan inovasi pelayanan kesehatan berbasis *mobile* cegah *stunting* (Ayo Ceting) di Puskesmas Andalas Kota Padang ini memberikan upaya kemudahan akses layanan berupa layanan konsultasi, layanan edukasi maupun layanan pencatatan data kembang anak dan ibu hamil, namun terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya diantaranya berupa kurangnya promosi dan sosialisasi sehingga belum banyak masyarakat yang menggunakan aplikasi.

Berdasarkan fenomena-fenomena yang telah dijelaskan sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait bagaimana faktor-faktor

⁴³Hasil Wawancara dengan Dokter Ulfia Izzati, Dokter Gizi dan Anak Puskesmas Andalas , Puskesmas Andalas, 12 November 2020.

⁴⁴Hasil Wawancara, Ibid.

yang mempengaruhi proses pelaksanaan inovasi pelayanan kesehatan berbasis *mobile* cegah *stunting* (Ayo Ceting) di Puskesmas Andalas Kota Padang dengan menggunakan teori faktor-faktor yang mempengaruhi proses pelaksanaan inovasi oleh Arundel dkk. Penting dilakukannya penelitian ini agar dapat dianalisis lebih lanjut terkait faktor-faktor yang mempengaruhi proses pelaksanaan inovasi pelayanan kesehatan berbasis *mobile* cegah *stunting* (Ayo Ceting) di Puskesmas Andalas Kota Padang sehingga menjadi pedoman bagi Puskesmas Andalas dan pihak lainnya dalam melakukan inovasi pelayanan kesehatan yang memanfaatkan kemajuan teknologi dalam mewujudkan inovasi yang efektif dan efisien bagi masyarakat.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi proses pelaksanaan Inovasi Pelayanan Kesehatan Berbasis *Mobile* Cegah *Stunting* (Ayo Ceting) di Puskesmas Andalas Kota Padang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai yaitu menganalisis faktor –faktor yang mempengaruhi proses pelaksanaan Inovasi Pelayanan Kesehatan Berbasis *Mobile* Cegah *Stunting* (Ayo Ceting) di Puskesmas Andalas Kota Padang melalui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan inovasi.

1.4 Manfaat Penelitian

1) Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu:

a. Menambah sumber pengetahuan dan wawasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi proses pelaksanaan Inovasi Pelayanan Kesehatan berbasis *Mobile Cegah Stunting* (Ayo Ceting) di Puskesmas Andalas Kota Padang.

b. Sumber informasi bagi peneliti sejenis pada masa yang akan datang.

2) Manfaat Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan bagi peneliti, serta sebagai masukan bagi pemerintah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk inovasi pelayanan berbasis *mobile*.

